

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:  
Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola  
PT. BPR Mitra Harmoni Mataram  
Semester I Tahun 2025

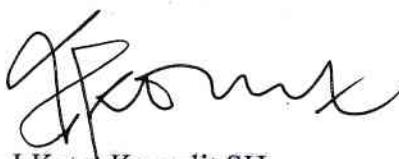
Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Mitra Harmoni Mataram selama semester 1 tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Mataram, 08 Juli 2025  
PT. BPR Mitra Harmoni Mataram  
Disetujui Oleh,

  
Agus Sutanto, ST  
Direktur Utama

  
I Ketut Komplit, SH  
Komisaris Utama

**KESIMPULAN UMUM**  
**HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**  
**SEMESTER I TAHUN 2025**

Nama BPR : PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM

Alamat : Jl. Langko No.14, Kel.Dasan Agung, Kec.Selaparang, Kota Mataram

Nomor Telepon : 0370 (7862718)

Posisi Laporan : Semester I Tahun 2025

Modal Inti : Rp 9.817.749.335

Total Aset : Rp 55.908.990.019

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	<i>Nilai 1 (Sangat Memadai)</i>
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	<i>Tidak Dinilai</i>
5	Penanganan Benturan Kepentingan	<i>Nilai 1 (Sangat Memadai)</i>
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
12	Rencana Bisnis BPR	<i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i>
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

## Kesimpulan

1. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dinilai telah terpenuhi, dengan proses dan hasil penerapan sangat memadai.
2. Berdasarkan penilaian, struktur dan infrastruktur pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi telah terpenuhi dengan proses dan hasil penerapan dinilai memadai
3. Berdasarkan penilaian, struktur dan infrastruktur pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris masih terpenuhi sebagian dengan proses dan hasil penerapan dinilai memadai
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite tidak dilakukan penilaian karena modal inti BPR masih dibawah 50 Milyar
5. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai telah terpenuhi, dengan proses dan hasil penerapan sangat memadai.
6. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai terpenuhi dengan proses dan hasil penerapan memadai.
7. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern telah terpenuhi dengan proses dan hasil penerapan memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern telah terpenuhi dengan proses dan hasil penerapan memadai.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan dengan proses dan hasil penerapan memadai
10. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai terpenuhi secara keseluruhan dengan proses dan hasil penerapan memadai
11. Implementasi struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan dengan proses dan hasil penerapan memadai
12. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan, proses penerapan dinilai memadai, namun untuk hasil penerapan dinilai kurang memadai

## Faktor Positif

### A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
2. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
3. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
4. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
5. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
7. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
8. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

10. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
11. Struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

#### B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian sangat memadai.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai memadai.
3. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah memadai.
4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan BPR tergolong sangat memadai.
5. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah memadai.
6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern BPR tergolong memadai.
7. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR dinilai sangat memadai.
8. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi memadai.
9. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan penilaian memadai.
10. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dinilai memadai.
11. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai memadai.

#### C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini dinilai sangat memadai.
2. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR adalah memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai.
4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan pencapaian sangat memadai.
5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR tergolong memadai.
6. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai memadai.
7. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR berada dalam kondisi memadai.
8. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai memadai.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai memadai.
10. Hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai memadai.

<b>Faktor Negatif</b>	
<b>A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur</b>	
Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian	
<b>B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian	
<b>C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dinilai kurang memadai.</li><li>2. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, yaitu Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dengan penilaian masih kurang memadai.</li></ol>	

Mataram, 08 Juli 2025

PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM

Disetujui Oleh,

  
**Agus Sutanto, ST**  
Direktur Utama

  
**I Ketut Komplit, SH**  
Komisaris Utama

**KERTAS KERJA LAPORAN  
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
SEMESTER I TAHUN 2025**

**Faktor 1. Aspek Pemegang Saham**

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	<i>Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	<i>Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Sangat Baik	<i>Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris pada BPR dinilai sangat baik.</i>
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Sangat Baik	<i>Pemegang saham tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris</i>
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Sangat Baik	<i>Pemegang saham memberikan dukungan permodalan yang kuat serta dukungan lainnya untuk pengembangan BPR</i>
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Sangat Baik	<i>Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat dengan menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris</i>
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Sangat Baik	<i>Pengambilan keputusan melalui RUPS dilakukan dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham</i>

<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	<b>Sangat Baik</b>	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil serta terdapat rencana penggabungan yang telah memperoleh surat persetujuan OJK terkait rencana tindak penggabungan
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	<b>Sangat Baik</b>	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, yaitu realisasi rencana aksi korporasi berupa rencana penggabungan
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	<b>Sangat Baik</b>	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	<b>Sangat Baik</b>	Penggunaan laba dan pembagian dividen untuk tahun buku 2024 sudah dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta sudah dimasukkan ke dalam hasil RUPS tahunan

#### **Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>

#### **Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	<b>9 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Sangat Baik</b>

Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 1 (Sangat Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham	
Nilai Faktor	
Nilai 1 (Sangat Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola sangat memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sudah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi secara berkala.</li> </ul>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1) Faktor Positif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
2) Faktor Negatif	PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1) Faktor Positif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris pada BPR dinilai sangat baik.</li> <li>2. Pemegang saham tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris</li> <li>3. Pemegang saham memberikan dukungan permodalan yang kuat serta dukungan lainnya untuk pengembangan BPR</li> <li>4. Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat dengan menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris</li> <li>5. Pengambilan keputusan melalui RUPS dilakukan dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham</li> </ul>

2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil serta terdapat rencana penggabungan yang telah memperoleh surat persetujuan OJK terkait rencana tindak penggabungan</li> <li>2. Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, yaitu realisasi rencana aksi korporasi berupa rencana penggabungan</li> <li>3. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris</li> <li>4. Penggunaan laba dan pembagian dividen untuk tahun buku 2024 sudah dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sudah dimasukkan ke dalam hasil RUPS tahunan</li> </ol>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

## Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Anggota Direksi telah terpenuhi sebanyak 2 org, dan salah satunya membawahkan fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi kedudukan BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Direksi BPR MH Mataram tidak melakukan rangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan keuangan, dan tidak memiliki kepemilikan saham
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Telah Terpenuhi	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Direksi dalam periode penilaian tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan

9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan OJK, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan</i>
---	---	------------------------	--

#### B. Proses Penerapan Tata Kelola

10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	<b>Baik</b>	<i>Direksi dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan secara independen dan di dalam pelaksanaan tugas Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain.</i>
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	<b>Baik</b>	<i>Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi</i>
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	<b>Baik</b>	<i>Direksi menindaklanjuti temuan auditor baik internal maupun eksternal.</i>
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	<b>Baik</b>	<i>Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris</i>
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<b>Baik</b>	<i>Direksi melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman tata tertib kerja</i>
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	<b>Baik</b>	<i>Direksi dalam mengambil kebijakan dan keputusan strategis telah melalui musyawarah mufakat, baik dengan Dewan komisaris maupun dengan Pejabat Eksekutif.</i>

16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<b>Baik</b>	<i>Direksi tidak menggunakan BPR dalam hal kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</i>
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<b>Baik</b>	<i>Setiap anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya</i>
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	<b>Baik</b>	<i>Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR melalui rapat bulanan</i>
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	<b>Baik</b>	<i>Direksi telah mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR</i>
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	<b>Baik</b>	<i>Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab</i>
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	<b>Baik</b>	<i>Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten</i>
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	<b>Baik</b>	<i>Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR</i>

#### C. Hasil Penerapan Tata Kelola

23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	<b>Baik</b>	<i>Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui RUPS</i>
----	---	-------------	---

24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	<b>Baik</b>	<i>Seluruh pegawai telah mengetahui serta terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR</i>
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	<b>Baik</b>	<i>Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi</i>
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	<b>Baik</b>	<i>Hasil rapat direksi telah dibuatkan risalah rapat dan juga daftar hadir (absensi).</i>
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, namun pencapaian hasil belum sesuai target BPR</i>
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Baik</b>	<i>Laporan Penerapan tata kelola telah dilaporkan setiap tahunnya oleh BPR baik ke OJK, Asosiasi BPR dan 1 kantor media dan/ atau majalah ekonomi</i>

#### **Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>9 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>

#### **Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	<b>18 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>

<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	Baik
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	Baik
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 2 (Memadai)</b>

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b>	
<b>Nilai Faktor</b>	
<b>Nilai 2 (Memadai)</b>	
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>	
<p>BPR telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.</li> <li>c. Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi</li> </ul>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	<b>Faktor Positif</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Direksi telah terpenuhi sebanyak 2 org, dan salah satunya membawahkan fungsi Kepatuhan</li> <li>2. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi kedudukan BPR.</li> <li>3. Direksi BPR MH Mataram tidak melakukan rangkap jabatan pada Bank dan/ atau perusahaan lain</li> <li>4. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan keuangan, dan tidak memiliki kepemilikan saham</li> <li>5. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi</li> <li>6. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi</li> <li>7. Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR</li> <li>8. Direksi dalam periode penilaian tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan</li> <li>9. Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan OJK, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan</li> </ul>

2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan secara independen dan di dalam pelaksanaan tugas Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain.</li> <li>2. Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi</li> <li>3. Direksi menindaklanjuti temuan auditor baik internal maupun eksternal.</li> <li>4. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris</li> <li>5. Direksi melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman tata tertib kerja</li> <li>6. Direksi dalam mengambil kebijakan dan keputusan strategis telah melalui musyawarah mufakat, baik dengan Dewan komisaris maupun dengan Pejabat Eksekutif.</li> <li>7. Direksi tidak menggunakan BPR dalam hal kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</li> <li>8. Setiap anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya</li> <li>9. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR melalui rapat bulanan</li> <li>10. Direksi telah mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR</li> <li>11. Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab</li> <li>12. Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten</li> <li>13. Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR</li> </ol>
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui RUPS</li> <li>2. Seluruh pegawai telah mengetahui serta terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR</li> <li>3. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi</li> <li>4. Hasil rapat direksi telah dibuatkan risalah rapat dan juga daftar hadir (absensi).</li> <li>5. Laporan Penerapan tata kelola telah dilaporkan setiap tahunnya oleh BPR baik ke OJK, Asosiasi BPR dan 1 kantor media dan/atau majalah ekonomi</li> </ol>
2)	Faktor Negatif

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>1. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, namun pencapaian hasil belum sesuai target BPR</p> |
|--|---|

### Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak Dinilai	BPR tidak menilai indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen karena modal inti kurang dari 50M
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah sesuai dengan ketentuan OJK
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, pengaturan rapat serta waktu dan etika kerja
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dewan komisaris dalam hal ini terkait dengan rangkap jabatan, memiliki posisi yang sama dan tidak lebih dari 2 BPR.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dekom dan Direksi tidak memiliki hubungan atau semenda sampai derajat kedua (sesama Dekom atau Direksi) terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Tidak Dinilai	BPR tidak menilai indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen karena modal inti kurang dari 50M
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian

8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dinilai telah terpenuhi.</i>
---	--	------------------------	--

#### B. Proses Penerapan Tata Kelola

9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan ikhtikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	<b>Baik</b>	<i>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan ikhtikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum</i>
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	<b>Baik</b>	<i>Dewan Komisaris pada saat rapat evaluasi bulanan dengan Direksi dan seluruh PE tetap mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR</i>
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	<b>Baik</b>	<i>Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait</i>
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	<b>Baik</b>	<i>Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, maupun OJK pada saat rapat evaluasi bulanan</i>
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	<b>Baik</b>	<i>Dewan Komisaris meminta Direksi memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR</i>

14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	<b>Baik</b>	<i>Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten</i>
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<b>Baik</b>	<i>Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal</i>
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	<b>Baik</b>	<i>Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah mufakat</i>
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<b>Baik</b>	<i>Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS</i>
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	<b>Baik</b>	<i>Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris melalui rapat evaluasi bulanan</i>
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<b>Baik</b>	<i>Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</i>
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	<b>Tidak Dinilai</b>	<i>BPR tidak menilai indikator pelaksanaan tugas dan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. karena modal inti kurang dari 50M</i>
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<b>Baik</b>	<i>Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi</i>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			

22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	<b>Baik</b>	<i>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS</i>
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	<b>Baik</b>	<i>Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan terdapat daftar hadir</i>
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	<b>Baik</b>	<i>Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran</i>
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Baik</b>	<i>Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK</i>
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, namun kinerja BPR belum mendapatkan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders,</i>

#### **Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>6 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	<b>0 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	<b>0 Indikator</b>
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>

#### **Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	<b>0 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Baik:	<b>16 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	<b>0 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	<b>0 Indikator</b>
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>

<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	Baik
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	Baik
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 2 (Memadai)</b>

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>
<b>Nilai Faktor</b>
<b>Nilai 2 (Memadai)</b>
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>

BPR telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan hasil penerapan tata kelola yang baik ditunjukkan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
- b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris
- c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.
- d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan kebijakan remunerasi dan nominasi

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPR tidak menilai indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen karena modal inti kurang dari 50M</li> <li>2. Anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah sesuai dengan ketentuan OJK</li> <li>3. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris,pengaturan rapat serta waktu dan etika kerja</li> <li>4. Dewan komisaris dalam hal ini terkait dengan rangkap jabatan, memiliki posisi yang sama dan tidak lebih dari 2 BPR.</li> <li>5. Dekom dan Direksi tidak memiliki hubungan atau semenda sampai derajat kedua (sesama Dekom atau Direksi) terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham</li> <li>6. BPR tidak menilai indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen karena modal inti kurang dari 50M</li> <li>7. Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian</li> <li>8. Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris</li> </ol>
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum</li> <li>2. Dewan Komisaris pada saat rapat evaluasi bulanan dengan Direksi dan seluruh PE tetap mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR</li> <li>3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait</li> <li>4. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, maupun OJK pada saat rapat evaluasi bulanan</li> <li>5. Dewan Komisaris meminta Direksi memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR</li> <li>6. Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten</li> <li>7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal</li> <li>8. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah mufakat</li> <li>9. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS</li> <li>10. Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris melalui rapat evaluasi bulanan</li> <li>11. Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</li> <li>12. BPR tidak menilai indikator pelaksanaan tugas dan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. karena modal inti kurang dari 50M</li> <li>13. Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi</li> </ol>
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS</li> <li>2. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan terdapat daftar hadir</li> <li>3. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran</li> <li>4. Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK</li> </ol>
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, namun kinerja BPR belum mendapatkan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders,</li> </ol>

#### Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak Dinilai	<i>BPR tidak menilai indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</i>
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak Dinilai	<i>BPR tidak menilai indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Tidak Dinilai	<i>BPR tidak menilai indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit</i>
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Tidak Dinilai	<i>BPR tidak menilai indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern</i>
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Tidak Dinilai	<i>BPR tidak menilai indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko</i>
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Tidak Dinilai	<i>BPR tidak menilai indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</i>

7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja</i>
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten</i>

#### C. Hasil Penerapan Tata Kelola

9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi</i>
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris</i>
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite</i>

#### Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Tidak Dinilai</b>

#### Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	<b>9 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Nilai Faktor yang Dipilih:	Tidak Dinilai

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>
<b>Nilai Faktor</b>
<b>Tidak Dinilai</b>

#### Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	<b>Telah Terpenuhi</b>	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	<b>Sangat Baik</b>	Selama periode penilaian tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada BPR
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	<b>Sangat Baik</b>	Selama periode penilaian, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, BPR tergolong sangat baik.

4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	<b>Sangat Baik</b>	Sampai saat ini tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada BPR
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	<b>Sangat Baik</b>	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan sangat baik

#### Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>

#### Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	<b>4 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 1 (Sangat Memadai)</b>

#### Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

<b>Nilai Faktor</b>
<b>Nilai 1 (Sangat Memadai)</b>
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik yaitu: a. BPR telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup sangat memadai. b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara sangat baik.

<b>No</b>	<b>Analisa Faktor Positif dan Negatif</b>
-----------	---

<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Selama periode penilaian tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada BPR
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Selama periode penilaian, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, BPR tergolong sangat baik. 2. Sampai saat ini tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada BPR 3. BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan sangat baik
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

## Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, dengan penilaian baik.

6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	<b>Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan, yang dinilai baik.</i>
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	<b>Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, pada BPR dinilai baik.</i>

#### C. Hasil Penerapan Tata Kelola

8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	<b>Baik</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Baik</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi baik.</i>

#### Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>4 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>

#### Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	<b>5 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 2 (Memadai)</b>

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	
	<b>Nilai Faktor</b>
<b>Nilai 2 (Memadai)</b>	
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik yaitu:	
a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.	
b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.	
Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/ atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.	

No	<b>Analisa Faktor Positif dan Negatif</b>
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	<b>Faktor Positif</b>
	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</p> <p>3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</p> <p>4. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</p>
2)	<b>Faktor Negatif</b>

	PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1) Faktor Positif	<p>1. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, dengan penilaian baik.</p> <p>2. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinilai baik.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, pada BPR dinilai baik.</p>
2) Faktor Negatif	
	PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1) Faktor Positif	<p>1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p> <p>2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p>
2) Faktor Negatif	
	PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

## Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan OJK
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Baik	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan OJK
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Tidak Dinilai	BPR tidak menilai karena modal inti di bawah 50M

8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	<b>Baik</b>	<i>Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan memadai</i>
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	<b>Baik</b>	<i>BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern</i>

#### C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	<i>BPR telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan OJK</i>
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Baik</b>	<i>BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK</i>

#### Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>5 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>

#### Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	<b>5 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 2 (Memadai)</b>

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>BPR telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik, yaitu sebagai berikut:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat bertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	<p><b>Faktor Positif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. BPR telah memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern</li> <li>2. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan OJK</li> <li>3. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional</li> <li>4. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama</li> <li>5. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif</li> </ul>
2)	<p><b>Faktor Negatif</b></p> <p>Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian</p>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	<p><b>Faktor Positif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan OJK</li> <li>2. BPR tidak menilai karena modal inti di bawah 50M</li> <li>3. Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan memadai</li> <li>4. BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern</li> </ul>
2)	<p><b>Faktor Negatif</b></p> <p>Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian</p>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	

1)	Faktor Positif
	<p>1. BPR telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan OJK</p> <p>2. BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK</p>
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian

## Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara OJK dengan KAP dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) telah memadai
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sangat Baik	BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sangat Baik	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK secara tepat waktu
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:			<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	

Indikator dengan nilai Sangat Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	Baik
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	Baik
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	Baik
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 2 (Memadai)</b>

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
	<b>Nilai Faktor</b>
<b>Nilai 2 (Memadai)</b>	
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>	
BPR telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik, yaitu penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana hasil audit Akuntan Publik dan KAP serta management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara OJK dengan KAP dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) telah memadai
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris 2. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK secara tepat waktu
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian

<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas</p> <p>2. Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK</p>
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian

## Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK</i>
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah Terpenuhi	<i>BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko</i>
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	<i>BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku</i>
5	Direksi:a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik, memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</i>

6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	<b>Baik</b>	Dewan Komisaris BPR telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	<b>Baik</b>	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	<b>Baik</b>	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan dan SOP
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan poliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	<b>Baik</b>	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	<b>Baik</b>	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh

14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	<b>Baik</b>	<i>Direksi telah memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait risiko terhadap suatu aktivitas atau produk baru</i>
----	--	-------------	--

#### C. Hasil Penerapan Tata Kelola

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	<b>Baik</b>	<i>Laporan profil risiko telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan OJK melalui sistem APOLO</i>
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	<i>BPR telah melaporkan produk dan aktivitas baru kepada OJK</i>
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	<b>Baik</b>	<i>BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin</i>

#### Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>3 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>

#### Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	<b>14 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 2 (Memadai)</b>

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik yaitu:</p> <p>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/atau 3) peringkat APU PPT PPPSPM rendah.</p> <p>b. BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut</p> <p>c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	<p><b>Faktor Positif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK</li> <li>2. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko</li> <li>3. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul> <p><b>Faktor Negatif</b></p> <p>Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian</p>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	<p><b>Faktor Positif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik, memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Dewan Komisaris BPR telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</li> <li>4. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko</li> <li>5. BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan dan SOP</li> <li>6. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan poliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan</li> <li>7. BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>8. BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh</li> <li>9. BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>10. BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh</li> <li>11. Direksi telah memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait risiko terhadap suatu aktivitas atau produk baru</li> </ul>
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan profil risiko telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan OJK melalui sistem APOLO</li> <li>2. BPR telah melaporkan produk dan aktivitas baru kepada OJK</li> <li>3. BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin</li> </ul>
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian

## Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Telah terdapat Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit..
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	Baik	Telah dilakukan evaluasi kebijakan dan SOP secara berkala
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Baik	Pada BPR tidak terdapat pelanggaran untuk pemberian kredit besar dan kepada pihak terkait
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Tidak terdapat pelanggaran BMPK selama periode penilaian
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Tidak ditemukan pelanggaran dan atau pelampaui BMPK selama periode penilaian
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:			Terpenuhi Secara Keseluruhan
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	

Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	<b>4 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 2 (Memadai)</b>

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
BPR telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik yaitu sebagai berikut:	
a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.	
b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan OJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dapat dilakukan dengan segera.	
c. Tidak terdapat pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Telah terdapat Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit..
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Telah dilakukan evaluasi kebijakan dan SOP secara berkala 2. Pada BPR tidak terdapat pelanggaran untuk pemberian kredit besar dan kepada pihak terkait
2)	Faktor Negatif

	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Tidak terdapat pelanggaran BMPK selama periode penilaian 2. Tidak ditemukan pelanggaran dan atau pelampuan BMPK selama periode penilaian
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian

## Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten</i>
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai</i>
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>BPR telah memiliki SOP terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	<b>Baik</b>	<i>BPR selalu memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi</i>
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	<i>Laporan keuangan triwulanan telah dipublikasikan dan ditempel di bagian dalam ruangan kantor yang mudah dilihat oleh nasabah atau masyarakat</i>
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	<i>Laporan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan OJK.</i>
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	<i>Transparansi produk telah dilakukan oleh BPR, sebelum melakukan transaksi baik Tabungan, Deposito dan Kredit dengan selalu menjelaskan terlebih dahulu mengenai produk tersebut kepada para calon nasabah</i>

8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Baik</i>	<i>Penyajian laporan telah sesuai dengan ketentuan OJK</i>
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	<i>Baik</i>	<i>Seluruh laporan yang disampaikan BPR telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.</i>

#### C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	<i>Baik</i>	<i>Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum</i>
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Baik</i>	<i>Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK serta dipublikasikan sesuai ketentuan OJK</i>
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	<i>Baik</i>	<i>Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, serta tindak lanjutnya telah disampaikan sesuai ketentuan OJK</i>

#### Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>3 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>

#### Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	<b>9 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	Baik
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	Baik
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	Baik
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 2 (Memadai)</b>

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>	
<b>Nilai Faktor</b>	
<b>Nilai 2 (Memadai)</b>	
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>	
BPR telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik yaitu sebagai berikut:	
a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.	
c. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.	
d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1) Faktor Positif	
	<p>1. Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten</p> <p>2. BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai</p> <p>3. BPR telah memiliki SOP terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi</p>
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. BPR selalu memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>2. Laporan keuangan triwulan telah dipublikasikan dan ditempel di bagian dalam ruangan kantor yang mudah dilihat oleh nasabah atau masyarakat</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Laporan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan OJK.</li> <li>4. Transparansi produk telah dilakukan oleh BPR, sebelum melakukan transaksi baik Tabungan, Deposito dan Kredit dengan selalu menjelaskan terlebih dahulu mengenai produk tersebut kepada para calon nasabah</li> <li>5. Penyajian laporan telah sesuai dengan ketentuan OJK</li> <li>6. Seluruh laporan yang disampaikan BPR telah sesuai dengan kondisi sebenarnyak.</li> </ul>
2)	Faktor Negatif
Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum</li> <li>2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK serta dipublikasikan sesuai ketentuan OJK</li> <li>3. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, serta tindak lanjutnya telah disampaikan sesuai ketentuan OJK</li> </ul>
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian

## Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	RBB dan rencana aksi keuangan berkelanjutan untuk tahun 2025 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	RRB yang disusun oleh Direksi telah mencakup rencana ke depan (menengah dan panjang).
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	RBB yang dibuat sepenuhnya telah didukung oleh pemegang saham, yang mana RBB ini memiliki tujuan guna memajukan BPR
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistik, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Baik	Telah mempertimbangkan segala sisi, termasuk manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Baik	Dewan komisaris melakukan pengawasan baik melalui tatap muka secara langsung maupun melalui media telekomunikasi.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Rencana Bisnis BPR telah dan selalu disampaikan kepada OJK.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Kurang Baik	Hasil dari kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis untuk periode semester 1 tahun 2025 belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen terhadap pemegang saham
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>3 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	<b>3 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 3 (Cukup Memadai)</b>

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR</b>	
<b>Nilai Faktor</b>	
<b>Nilai 3 (Cukup Memadai)</b>	
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>	
<p>BPR telah memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik yaitu rencana bisnis BPR telah disusun secara realistik, komprehensif, dan terukur oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan namun hasil kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis pada semester 1 tahun 2025 belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk penyampaian laporan rencana bisnis sudah dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. RBB dan rencana aksi keuangan berkelanjutan untuk tahun 2025 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris</li> <li>2. RRB yang disusun oleh Direksi telah mencakup rencana ke depan (menengah dan panjang).</li> <li>3. RBB yang dibuat sepenuhnya telah didukung oleh pemegang saham, yang mana RBB ini memiliki tujuan guna memajukan BPR</li> </ul>

2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mempertimbangkan segala sisi, termasuk manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.</li> <li>2. Dewan komisaris melakukan pengawasan baik melalui tatap muka secara langsung maupun melalui media telekomunikasi.</li> </ul>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Bisnis BPR telah dan selalu disampaikan kepada OJK.</li> </ul>
2)	Faktor Negatif
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil dari kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis untuk periode semester 1 tahun 2025 belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen terhadap pemegang saham</li> </ul>

## Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 1 (Sangat Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 1 (Sangat Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 3 (Cukup Memadai)
Modus Nilai Faktor		Nilai 2
Median Nilai Faktor		Nilai 2
Rata-rata Nilai Faktor		Nilai 1.91
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

## Kesimpulan

1. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dinilai telah terpenuhi, dengan proses dan hasil penerapan sangat memadai.
2. Berdasarkan penilaian, struktur dan infrastruktur pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi telah terpenuhi dengan proses dan hasil penerapan dinilai memadai
3. Berdasarkan penilaian, struktur dan infrastruktur pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris masih terpenuhi sebagian dengan proses dan hasil penerapan dinilai memadai
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite tidak dilakukan penilaian karena modal inti BPR masih dibawah 50 Miliar
5. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai telah terpenuhi, dengan proses dan hasil penerapan sangat memadai.
6. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai terpenuhi dengan proses dan hasil penerapan memadai.
7. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern telah terpenuhi dengan proses dan hasil penerapan memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern telah terpenuhi dengan proses dan hasil penerapan memadai.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti

Fraud yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan dengan proses dan hasil penerapan memadai
10. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai terpenuhi secara keseluruhan dengan proses dan hasil penerapan memadai
11. Implementasi struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan dengan proses dan hasil penerapan memadai
12. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan, proses penerapan dinilai memadai, namun untuk hasil penerapan dinilai kurang memadai

### Faktor Positif

#### A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
2. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
3. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
4. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
5. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
7. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
8. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
10. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
11. Struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

#### B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian sangat memadai.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai memadai.
3. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah memadai.
4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan BPR tergolong sangat memadai.
5. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah memadai.
6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern BPR tergolong memadai.
7. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR dinilai sangat memadai.
8. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi memadai.

- |  |
|--|
| <p>9. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan penilaian memadai.</p> <p>10. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dinilai memadai.</p> <p>11. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai memadai.</p> |
|--|

**C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola**

- |  |
|--|
| <p>1. Hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini dinilai sangat memadai.</p> <p>2. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR adalah memadai.</p> <p>3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai.</p> <p>4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan pencapaian sangat memadai.</p> <p>5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR tergolong memadai.</p> <p>6. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai memadai.</p> <p>7. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR berada dalam kondisi memadai.</p> <p>8. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai memadai.</p> <p>9. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai memadai.</p> <p>10. Hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai memadai.</p> |
|--|

**Faktor Negatif**

**A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur**

Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian
--

**B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola**

Tidak terdapat faktor negatif selama periode penilaian
--

**C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola**

- |  |
|--|
| <p>1. Hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dinilai kurang memadai.</p> <p>2. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, yaitu Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dengan penilaian masih kurang memadai.</p> |
|--|